

ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI "STAKEHOLDERS" EKSTERNAL DAN INTERNAL TENTANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Swarmilah Hariani¹⁾, Syamsu Alang²⁾

UNIVERSITAS MERCUBUANA¹⁾, STIE BPKP Jakarta²⁾

swarmilah@mercubuana.ac.id, syamsualang@yahoo.com

ABSTRACT

The reform era is like this, where each region is given the authority to manage the area or often referred to as regional autonomy and accountable to stakeholders. In order for a regional government to run well, the regional government is required to be able to carry out good governance. One of the conditions for the realization of good governance is the achievement of accountability. As a result of regional autonomy, local governments are required to manage regional finance accountably to stakeholders. However, the problem is that the users of financial statements are stakeholders that are divided into 2 namely external stakeholders and internal stakeholders who certainly have different interests. This study aims to examine that there are differences in perceptions between external and internal stakeholders about accountability in regional financial management in terms of accountability criteria. the maximum implementation of regulations governing regional financial management has not been implemented, such as the adoption of Government Regulation 71 of 2010 and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006.

Keywords: *Good Governance, Accountability, Regional Finance*

ABSTRAK

Era reformasi seperti ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerah atau sering disebut dengan otonomi daerah dan mempertanggungjawabkannya kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Agar pemerintahan suatu daerah berjalan dengan baik, maka pemerintahan daerah dituntut untuk dapat melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu syarat terwujudnya good governance yaitu tercapainya akuntabilitas. Akibat dari adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel kepada para stakeholders. Akan tetapi, masalahnya adalah pengguna laporan keuangan itu adalah para stakeholders yang dibedakan menjadi 2 yaitu stakeholders eksternal dan stakeholders internal yang tentunya memiliki kepentingan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menguji bahwa terdapat perbedaan persepsi antara stakeholders eksternal dan internal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek kriteria akuntabilitas terdapat perbedaan persepsi stakeholders eksternal dan internal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek kriteria akuntabilitas dan persepsi yang lebih tinggi pada stakeholders internal karena belum diterapkannya secara maksimal aturan-aturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, seperti penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006.

Kata Kunci: *Good Governance, Akuntabilitas, Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah sebagai agen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah disertai "kekuasaan" oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan perannya sebagai pelaksana pembangunan, pembuat regulasi, pemberi layanan kepada masyarakat dan pemberdaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan tersebut, jika tidak demikian maka pemerintahannya akan menjadi taruhannya (Gedeona, 2007).

Haryanto (2007) dalam Sutedjo (2009) menjelaskan bahwa pemerintah selaku pihak yang diberi kekuasaan sangat dituntut untuk dapat melakukan tata pemerintahan yang baik atau Good Governance, dimana "baik" yang dimaksud yaitu tata pemerintahan yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance. Pemerintah sebagai pihak yang menggunakan kekuasaan dan sumber daya keuangan yang berasal dari rakyat wajib mempertanggungjawabkan amanah tersebut sebagai wujud akuntabilitas kepada rakyat. Kama (2011) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga eksistensinya sangat diperlukan sebab pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya.

Jabra dan Dwivedi (1989) dalam Kama (2011) menyatakan bahwa "akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dalam Pasal 1 nomor 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Pada Bab III Pasal 3 disebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalisme, 6) Asas Profesionalisme, dan 7) Asas Akuntabilitas

Krina (2003) juga mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan *good governance* yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Dalam konteks pembangunan, *governance* adalah suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan, sehingga dengan demikian *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

Mulyana (2006) dalam Wulandari dkk (2009) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dapat dipertimbangkan sebagai media akuntabilitas.

Principal dan *agent* di atas kemudian disebut dengan stakeholders. Stakeholders terbagi menjadi 2 (dua) yaitu stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders internal yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah otonomi daerah yang terdiri dari para pegawai negeri sipil pemerintahan khususnya dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Jenderal Provinsi DKI Jakarta. Stakeholders internal ini secara langsung terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah hingga pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hampir dapat dipastikan mereka mempunyai persepsi yang positif dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan stakeholders eksternal yang dimaksud di sini adalah pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan pemerintahan daerah yang mewakili pihak publik yaitu LSM dan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Stakeholders eksternal ini mewakili kepentingan publik untuk mengetahui tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun karena stakeholders eksternal tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang cenderung negatif tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dibandingkan stakeholders internal.

Fenomena yang terjadi selama ini bahwa antara stakeholders eksternal dan internal memiliki perbedaan persepsi mengenai akuntabilitas khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah, padahal seharusnya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* perbedaan persepsi tersebut seminimal mungkin atau bahkan tidak ada apabila pemerintah daerah telah melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik dan akuntabel.

Provinsi DKI Jakarta sebagai otonomi daerah merupakan salah satu wilayah yang perkembangannya tergolong pesat didalam wilayah Provinsi DKI Jakarta banyaknya potensi wisata serta budaya dan sentra pendidikan maka Provinsi DKI Jakarta harus bisa melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring bergulirnya otonomi daerah maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat menyajikan laporan keuangannya secara akuntabel kepada para stakeholders di Provinsi DKI Jakarta. Di beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa persepsi stakeholders terhadap akuntabilitas adalah berbeda, namun belum menjelaskan aspek apa saja yang mempengaruhi perbedaan persepsi tersebut secara konklusif. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis tentang aspek apa saja yang mempengaruhi perbedaan persepsi di antara para stakeholders terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga peneliti memilih judul "Analisis Perbedaan Persepsi Stakeholders Eksternal Dan Internal Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta)"

KAJIAN TEORI

Good Governance

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Untuk mewujudkan good governance, Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kemudian untuk mendukung terjadinya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)
- 2) Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
- 3) Reformasi Sistem Pemeriksaan (*audit reform*)
- 4) Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*).

Kjær (2008) menjelaskan bahwa *good governance* diperkenalkan dalam agenda oleh Bank Dunia karena diperlukan untuk menjelaskan mengapa sejumlah negara gagal mengembangkan, terlepas dari fakta bahwa mereka telah mengadopsi kebijakan penyesuaian neo-liberal yang dikenakan pada mereka oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Jawabannya adalah 'pemerintahan yang buruk', dipahami sebagai pejabat publik yang hanya mementingkan diri sendiri dan korupsi dalam melakukan pelayanan publik. Dengan demikian, saran untuk negara-negara berkembang adalah agar selalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi pelayanan publik. Keseluruhan model yang harus 'ditransfer' salah satunya adalah pengurangan pengeluaran, privatisasi dan reformasi pelayanan publik, yaitu tidak hanya kurang, tetapi juga pemerintahan yang lebih baik. Selama tahun 1990-an para donor bilateral juga memberikan peningkatan tekanan kepada pemerintah penerima bantuan untuk mengadakan pemilihan yang demokratis. Karenanya, model tata kelola yang baik dipromosikan oleh donor dan lembaga keuangan internasional dibangun di atas Anglo-Amerika negara liberal-demokratis.

Persepsi

Sri Wisnu (2007) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa persepsi merupakan kerangka bagi individu untuk memahami suatu obyek. Individu akan bertindak atas dasar rangsangan yang diterimanya. Persepsi dimulai dari adanya kontak antara individu dengan obyek yang diikutinya dengan adanya interaksi. Dengan demikian persepsi bersifat individu dan subyektif. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1989) dalam Sri Wisnu (2007) persepsi adalah proses yang dialami oleh individu dalam menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu rangsangan ke dalam suatu gambaran yang berarti dan koheren dengan dunia luar.

Syauqi dalam Halim (2009) menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah: transparansi, akuntabilitas, dan value money. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi berarti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat luas. Masyarakat selain memiliki hak untuk mengetahui anggaran, juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sementara value money adalah penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu: ekonomis, efisien, dan efektif.

Ekonomis berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektif yaitu bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja, serta meneliti laporan kegiatan dan mengadakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan fisik kegiatan untuk mengkaji sejauh mana pencapaian tujuan kegiatan yang bersangkutan dan melakukan peninjauan lapangan. Menurut Setiyawati (2013) Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

Keuangan daerah menurut Yuwono (2008, h.42) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sementara itu menurut Sitompul pengelolaan keuangan daerah meliputi: a. Perencanaan: Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah yang memerlukan adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah. b. Pelaksanaan: Larangan untuk melakukan pengeluaran

yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien. c. Pelaporan: Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan. d. Pertanggungjawaban: Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan terhadap penggunaan anggaran.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris disebut "*accountability*" yang artinya "yang dapat dipertanggungjawabkan". Seringkali akuntabilitas diartikan sama dengan *responsibility* yang juga berarti tanggung jawab, akan tetapi keduanya memiliki arti yang berbeda. Dalam kaitannya dengan suatu organisasi, *responsibility* merupakan otoritas/kewenangan yang diberi alasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas/kewenangan yang diperolehnya tersebut. Kama (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur, apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan, dimana dana publik tadi ditetapkan, dan tidak digunakan secara ilegal.

Menurut Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam Concepts Statement No.1 seperti yang dikutip oleh Halim (2007) tentang *Objectives of Financial Reporting* yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Terdapat kaitan yang jelas antara akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna (stakeholders) lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, baik aktivitas finansial maupun nonfinansial. Selanjutnya, Concepts Statements no.1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Halim (2007) menjelaskan bahwa sebagai syarat agar terlaksananya transparansi penyelenggaraan keuangan daerah maka diperlukan akuntabilitas publik. Untuk itu penyediaan serangkaian sumber informasi atau data dan penjelasan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada shareholder dan stakeholder daerah menjadi sangat penting bagi terlaksananya akuntabilitas publik. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap dana yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya bahwa APBD harus mampu mencerminkan kebutuhan

riil masyarakat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam perencanaan anggaran daerah di era otonomi harus dirancang dengan pendekatan yang berorientasi pada kinerja (*performance oriented*). Hal ini memberikan arti bahwa dalam perencanaan anggaran daerah, Pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan berapa, dari mana, dan kemana dana dialokasikan, tapi juga harus mempertimbangkan output dan outcome dari setiap dana yang dialokasikan tersebut. Penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintah mempengaruhi penyajian keuangan pernyataan. Ini karena penerapan akuntansi akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah seperti menilai efektivitas dan kinerja organisasi (Hidayah; 2018).

Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini berikut dikemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel penelitian ini:

- 1) Wulandari dkk (2009) dalam penelitian: "Persepsi Users atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah". Hasil penelitian menyebutkan : 1) Terdapat perbedaan persepsi antara internal users dan external users atas akuntabilitas publik laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Terdapat perbedaan persepsi antara internal users dan external users atas akuntabilitas keuangan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Surakarta.
- 2) Irianto (2008) dalam penelitian: "Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri se-Kabupaten Purworejo)". Hasil penelitian menyebutkan: 1) Terdapat perbedaan rata-rata persepsi stakeholders terhadap pengelolaan keuangan sekolah dan faktor-faktor yang membedakan adalah kejelasan peran dan tanggung jawab pengelola keuangan sekolah, ketersediaan informasi bagi publik, dan jaminan integritas. 2) Terdapat perbedaan rata-rata persepsi stakeholders terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dan faktor-faktor yang membedakan persepsi akuntabilitas adalah kualitas penyusunan dokumen APBS, laporan keuangan periodik dan tahunan, dan partisipasi stakeholders dalam menciptakan akuntabilitas
- 3) Sutedjo (2009) dalam penelitian: "Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah". Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1) Adanya perbedaan rata-rata persepsi stakeholders (internal dan eksternal) terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal. 2) Adanya perbedaan rata-rata persepsi stakeholder (internal dan eksternal) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal

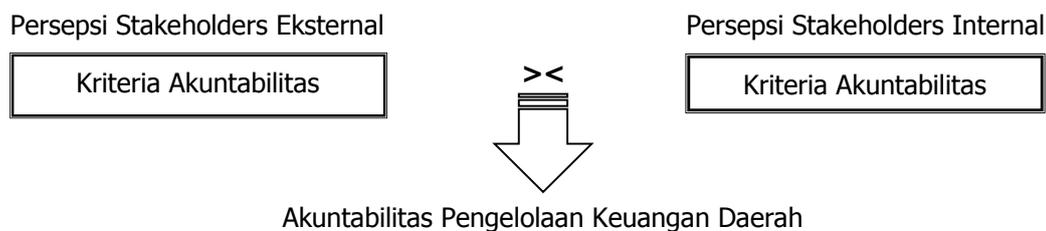
Hipotesis Kriteria Akuntabilitas

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Wisnu (2007) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persepsi stakeholders terhadap kriteria akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah dimana perbedaan persepsi terjadi karena adanya perbedaan ukuran yang dijadikan

pedoman untuk menilai/menetapkan sesuatu atau kriteria akuntabilitas keuangan. Mengacu pada hasil penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ada perbedaan persepsi antara stakeholders eksternal dan internal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek kriteria akuntabilitas.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian Yang dimaksud dengan stakeholders internal dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas menurut Perda Nomor 12 Tahun 2011 yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang dimaksud dengan stakeholders eksternal dalam penelitian ini yaitu BPKP dan LSM. BPKP memiliki visi yaitu: "Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas".

BPKP juga mempunyai tugas menurut Pasal 52, 53, dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaitu melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut BPKP membawahi 5 bidang, yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Bidang Akuntan Negara, dan Bidang Investigasi. Selain ke-5 bidang tersebut terdapat juga kelompok jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional analis kepegawaian, jabatan fungsional arsiparis, dan jabatan fungsional pranata komputer dan LSM selaku perwakilan dari pihak publik penyandang dana keuangan daerah.

Sehingga objek penelitian ini dari stakeholders eksternal yaitu BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan LSM yang memperhatikan masalah pemerintahan. Dari stakeholders internal yaitu Pemerintah Daerah khususnya dari BPKAD (Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah) dan Inspektorat Provinsi.

Populasi Dan Sampel

Sampel atas responden (stakeholders eksternal dan internal) dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010), dimana sampel akan dipilih dengan masing-masing kriteria sebagai berikut:

- 1) stakeholders internal : sampel untuk stakeholders internal ini akan dipecah menjadi 2 (dua) subsampel yaitu para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan PNS dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang berwenang secara langsung terhadap masalah pengelolaan keuangan daerah di mana kedua subsampel ini berperan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah beserta pengawasannya.
- 2) stakeholders eksternal : sampel untuk stakeholders eksternal ini akan dipecah menjadi 2 (dua) subsampel yaitu BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selaku auditor dan LSM-LSM yang ada di Provinsi DKI Jakarta khususnya yang membidangi masalah pemerintahan. Kedua subsampel ini berperan sebagai pihak publik penyandang dana keuangan daerah dan sebagai pemeriksa keuangan daerah.

Untuk penentuan jumlah sampel yaitu masing-masing sebesar 30 responden untuk masing-masing subsampel. Hal ini senada dengan petunjuk yang dinyatakan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (2003) bahwa sampel yang dipecah menjadi subsampel ukuran sampelnya minimal sebanyak 30 untuk masing-masing subsampel.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber, yaitu sumber primer dan sekunder, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010). Untuk penelitian ini lebih cocok jika menggunakan jenis data sumber primer yaitu data yang diambil langsung dari sumber/responden melalui kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2010).

Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pertanggungjawaban atas perencanaan APBD, pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja, serta pertanggungjawaban APBD tersebut kepada para stakeholders.

Persepsi

Persepsi berarti kerangka bagi individu untuk memahami suatu objek dengan didahului adanya kontak antara individu dengan objek yang kemudian menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal obyek. Persepsi merupakan tanggapan yang timbul atas sesuatu yang diterima oleh individu

berdasarkan proses pemahaman, penyeleksian, dan penginterpretasian yang dialami oleh individu. dengan demikian persepsi bersifat individu dan subyektif.

Perbedaan Persepsi Stakeholders Eksternal dan Internal Jika Ditinjau Dari Kriteria Akuntabilitas

Masing-masing stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda dalam memandang pengelolaan keuangan negara sehingga dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga berbeda ditambah lagi belum adanya standar yang baku untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga masing-masing pihak memiliki alat ukur penilaian akuntabilitas yang berbeda-beda pula yang pada akhirnya mempengaruhi perbedaan persepsi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sudut pandang tersebut bisa dari apakah laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana baik dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari masyarakat sudah cukup memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu jenis dan bentuk laporan keuangan baku seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah (yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas serta penjelasan Atas Laporan Keuangan tersebut) sudah memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga penyebab tersebut diukur menggunakan instrumen daftar pertanyaan yang dikembangkan oleh Sri Wisnu, Surahman Irianto, Sutedjo dengan beberapa penyesuaian untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010). Sedangkan validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran (Suliyono, 2011).

Uji Reliabilitas

Nunnally (1967) dalam Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Repeated Measure* atau pengukuran ulang : seorang responden disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda lalu dilihat apakah ia konsisten dengan jawabannya.
- 2) *One Shot* atau pengukuran sekali saja: di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik parametris dengan bentuk hipotesis komparatif 2 sampel independen, maka teknik uji hipotesis yang sesuai yaitu T-test Independent. Uji ini akan menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Oleh karena penelitian ini menggunakan data interval maka uji yang sesuai adalah uji T Independen.

Uji T (T-Test)

Uji T yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu T-test Independent. Uji T ini dilakukan jika data antara variabel yang satu tidak saling berkaitan atau independen (Suliyono, 2011). Uji ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yaitu stakeholders eksternal dan internal yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan persepsi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dikemukakan oleh para stakeholders eksternal dan internal. Untuk stakeholders eksternal diwakili oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan LSM, sedangkan untuk stakeholders internal diwakili oleh PNS Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas BKAD dan juga Inspektorat DKI Jakarta. Perbedaan persepsi yang dianalisis adalah kriteria akuntabilitas.

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu stakeholders eksternal dan internal. Populasi untuk stakeholders eksternal yaitu BPKP Perwakilan DKI Jakarta dan LSM yang ada di DKI Jakarta yang mewakili kepentingan publik sekaligus sebagai pengawas eksternal pemerintah daerah. Sedangkan populasi untuk stakeholders internal yaitu BPKAD DKI Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta selaku pihak dari pemerintah yang bertugas mengelola keuangan daerah dan melakukan pengawasan internal mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kuesioner yang disebar sebanyak 120 buah dengan jumlah responden untuk masing-masing subsampel stakeholders eksternal maupun internal adalah sebanyak 30 responden.

Jenis Kelamin (Gender) Responden

Jenis kelamin (gender) responden dalam penelitian ini didapat prosentase untuk responden pria secara keseluruhan sebanyak 55,8% dengan jumlah frekuensi sebanyak 67 responden dan untuk responden wanita sebanyak 44,2% dengan jumlah frekuensi sebanyak 53 responden. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Kelamin (Gender) Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	67	55,8%
Wanita	53	44,2%
Total	120	100%

Sumber : data primer diolah SPSS 20.00

Tingkat Pendidikan Responden

Dalam penelitian ini tidak ada responden yang tingkat pendidikannya SD dan SMP sederajat sehingga untuk perhitungan statistik deskriptifnya langsung ke tingkat pendidikan SMA. Untuk responden dengan tingkat pendidikan SMA secara keseluruhan sebanyak 18,3% dengan jumlah frekuensi sebanyak 22 responden, untuk responden dengan tingkat pendidikan Sarjana secara keseluruhan sebanyak 70,2% dengan jumlah frekuensi sebanyak 85 responden, dan untuk responden dengan tingkat pendidikan di luar SD, SLTP, SMA, maupun Sarjana adalah sebanyak 10,8% dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan sebanyak 13 responden. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	22	18,3%
Sarjana	85	70,8%
Lainnya	13	10,8%
Total	120	100%

Sumber : data primer diolah SPSS 20.00

Usia Responden

Untuk tingkatan usia responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok usia 21-30 tahun, kelompok usia 31-40 tahun, dan kelompok usia > 40 tahun. Dari hasil analisis data didapat prosentase untuk responden yang berusia 21-30 tahun secara keseluruhan sebanyak 15% dengan jumlah frekuensi sebanyak 18 responden, untuk responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 40,8% dengan jumlah frekuensi sebanyak 49 responden, dan untuk responden yang berusia >40 tahun secara keseluruhan sebanyak 44,2% dengan jumlah frekuensi sebanyak 53 responden. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Usia Responden

Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
21-30 tahun	18	15%
31-40 tahun	49	40,8%
> 40 tahun	53	44,2%
Total	120	100%

Sumber : data primer diolah SPSS 20.00

Uji Analisis Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner mengenai analisis perbedaan persepsi stakeholders eksternal dan internal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah jika ditinjau dari beberapa aspek kriteria akuntabilitas. Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji analisis data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kedua uji ini bertujuan untuk mengetahui kesahihan dan keandalan instrumen penelitian, menggunakan sampel yang mirip dengan responden sebenarnya sebanyak 30 sampel (Sutedjo, 2009). Untuk pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas menggunakan alat bantu Program SPSS.

Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang hendak diketahui (Iprianto, 2009).

Tabel 4. Uji Validitas untuk Kriteria Akuntabilitas

Correlations

		k1	k2	k3	k4	k5	k6	Total
k1	Pearson Correlation	1	.044	.046	.269**	.357**	.022	.480**
	Sig. (2-tailed)		.631	.620	.003	.000	.809	.000
	N	120	120	120	119	120	120	120
k2	Pearson Correlation	.044	1	-.050	.236**	.122	.256**	.593**
	Sig. (2-tailed)	.631		.586	.010	.185	.005	.000
	N	120	120	120	119	120	120	120
k3	Pearson Correlation	.046	-.050	1	-.008	.074	-.143	.179
	Sig. (2-tailed)	.620	.586		.929	.421	.119	.051
	N	120	120	120	119	120	120	120
k4	Pearson Correlation	.269**	.236**	-.008	1	.126	.056	.530**
	Sig. (2-tailed)	.003	.010	.929		.172	.543	.000
	N	119	119	119	119	119	119	119
k5	Pearson Correlation	.357**	.122	.074	.126	1	.214*	.590**
	Sig. (2-tailed)	.000	.185	.421	.172		.019	.000
	N	120	120	120	119	120	120	120
k6	Pearson Correlation	.022	.256**	-.143	.056	.214*	1	.575**
	Sig. (2-tailed)	.809	.005	.119	.543	.019		.000
	N	120	120	120	119	120	120	120
total	Pearson Correlation	.480**	.593**	.179	.530**	.590**	.575**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.051	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	119	120	120	120

Sumber: Data diolah SPSS 20.00

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas atau keandalan kuesioner dimana kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/ Pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006 dalam Sutedjo, 2009). Selain uji validitas, dilakukan uji reliabilitas untuk meyakinkan bahwa instrumen tersebut memang benar-benar dapat mengukur seakuratnya (accurately) terhadap konsep yang diukur, pengukuran seakuratnya ini berhubungan dengan reliabilitas (Wiyono, 2011). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas atau keandalan kuesioner dimana kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/ Pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006 dalam Sutedjo, 2009).

Tabel 5. Uji Reliabilitas untuk Kriteria Akuntabilitas

Reliability Statistics			H	Stakeholders	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	H	Internal	60	23.3333	2.29714	.29656
				Eksternal		18.5167	2.48037	.32022
.686	.664	7						

Sumber : data primer diolah SPSS 20.00

Uji Hipotesis

Langkah awal pengujian yaitu melakukan uji melihat pada kesamaan atau perbedaan nilai rata-rata jawaban responden. Setelah itu melihat pada kesamaan atau perbedaan mean masing-masing dengan kelompok responden. Untuk mendukung atau tidak mendukung hipotesis, mengacu pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Uji T (T-TEST)

Uji T (T-test) yang digunakan dalam penelitian ini adalah T-test untuk sampel independen. Uji T ini digunakan jika data antara variabel yang satu tidak saling berkaitan/independen (Suliyono, 2011). Untuk melihat secara ringkas hasil uji T dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 6. Uji Hipotesis Output Kedua (Independent Samples T-test)

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kriteria akuntabilitas	Equal variances assumed	.817	.368	11.036	118	.000	4.81667	.43645	3.95239	5.68095
	Equal variances not assumed			11.036	117.312	.000	4.81667	.43645	3.95233	5.68100

Sumber : data primer diolah SPSS 20.00

Memperhatikan data tabel diatas maka deskripsinya terdapat perbedaan persepsi antara stakeholders eksternal dan internal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek kriteria akuntabilitas. Dari hasil uji SPSS didapat 2 (dua) macam output, output bagian pertama menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban dari masing-masing stakeholders berbeda, yaitu untuk stakeholders eksternal sebesar 18,5167 dan untuk stakeholders internal sebesar 23,3333, secara absolut jelas bahwa rata-rata persepsi antara stakeholders eksternal dan internal, dari nilai mean tersebut nampak bahwa nilai untuk stakeholders internal lebih tinggi dari pada stakeholders eksternal sebesar 4,81667, hal ini menunjukkan bahwa stakeholders internal memiliki penilaian yang lebih tinggi mengenai kriteria akuntabilitas. Dalam output bagian kedua, nilai probabilitas yang tampak dari nilai Levene's test yaitu $>0,05$ yang berarti bahwa variansnya sama atau datanya homogen maka asumsi yang digunakan adalah equal variances assumed. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata persepsi pada variabel Kriteria Akuntabilitas ada perbedaan antara stakeholders eksternal dan internal, dari nilai mean tersebut nampak bahwa nilai untuk stakeholders internal lebih tinggi dari pada stakeholders eksternal sebesar 4,81667, hal ini menunjukkan bahwa stakeholders internal memiliki penilaian yang lebih tinggi mengenai kriteria akuntabilitas. Nilai t hitung sebesar 11,036 dengan probabilitas $<0,05$ dan nilai t tabel untuk df sebesar 118 adalah 1,9803, sehingga nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai yang diperoleh stakeholders internal dengan eksternal mengenai kriteria akuntabilitas, dengan demikian Hipotesis terdukung.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Terdapat perbedaan persepsi stakeholders eksternal dan internal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek kriteria akuntabilitas dan persepsi yang lebih tinggi pada stakeholders internal karena belum diterapkannya secara maksimal aturan-aturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, seperti penerapan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
2. Adapun bentuk implikasi ini yaitu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel harus memiliki sistem birokrasi dan informasi yang memadai agar semakin memudahkan publik dalam mengakses informasi, kapabilitas SDM yang memadai juga diperlukan agar penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan yang tak kalah pentingnya yaitu adanya transparansi dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. (2007). Akuntabilitas Kelembagaan Eksekutif. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 4 No.1, STIA LAN Bandung. Maret 2007.
- Ghozali, Imam. (2009). Analisis Multivariat Lanjutan dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Cetakan IV.

- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2017). Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. (2009). Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah : Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Halim Abdul dan Ibnu Mujib. (2009) Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hari Setiyawati (2013). The effect of Internal Accountants' Competence, Managers' Commitment to Organizations and the Implementation of the Internal Control System on the Quality of Financial Reporting. International Journal of Business and Management Invention. ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org Volume 2 Issue 11 || November. 2013|| PP.19-27.
- Irianto, Surahman. (2008). Pengaruh Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri se Kabupaten Purworejo), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tesis. etd.repository.ugm.ac.id
- Kama, H.M. Anis Zakaria. (2011). Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Ilmiah Ishlah ISSN. 1410-9328 Vol.13 No.03, September-Desember 2011.
- Krina, Loina Lalolo. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &Partisipasi, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan, Teguh. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan, Bisnis & Birokrasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol.16 No.2, Mei-Agustus 2009.
- Lalolo, Krina P, (2003) "indicator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi" Http://good governance: Bappenas.go.id./informas.Htm, Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No.1, Mei 2006.
- Nurul Hidayah (2018). Influence of Human Resource Competence and Role of Culture on Accrual Accounting Implementation Effectiveness (Survey: Work Unit of Local Government Area in Banten Province). Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online). Vol.9, No.2, 2018. www.iiste.org
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
- Republik Indonesia. (2001). Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2004), Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 161 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu), Pekbis Jurnal Vol.3 No.3, November 2011.
- Sadjiarto, Arja. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.2 No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. 2000.
- Sekaran, Uma. (2010). Research Methods For Business: A Skill Building Approach Fourth Edition, John Wiley & Sons Inc., United States of America.
- Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutedjo. (2009). Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal), Semarang: Universitas Diponegoro. Tesis
- Wisnu H. Sri R. (2007). Persepsi Stakeholders terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Tesis.
- Wulandari, Suci, Djoko S. & Subekti D. (2009). Persepsi Users Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Vol.9 No.1, September 2009.
- Yuwono, Sony dkk. (2008). Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Malang: Bayumedia Publishing.